

Tax Ratio and Degree of Regional Fiscal Autonomy Moderate Effect of Economic Growth on Human Development Index

I Gede Eka Witanaya Partha¹

A.A.N.B Dwirandra²

^{1,2}Faculty of Economics and Business, Universitas Udayana, Indonesia

*Correspondences : ekawitanaya@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to obtain empirical evidence of the effect of economic growth on the human development index (HDI) in the districts and cities of Bali Province in 2014–2019 by including the tax ratio and the degree of regional fiscal autonomy as moderating variables. The research was conducted in all regencies and cities in Bali Province. The data in this study were obtained from the Central Bureau of Statistics which were tested using moderated regression analysis. The results of this analysis indicate that economic growth has a positive effect on HDI and the influence of HDI cannot be moderated by the tax ratio. This study also finds that the effect of economic growth on HDI is strengthened by the degree of regional fiscal autonomy. Regional autonomy is able to increase economic growth which can be achieved with a degree of regional fiscal autonomy through the implementation of regional autonomy. On the other hand, the tax ratio may not necessarily increase the HDI level due to the uneven development associated with the increase in HDI in the Province of Bali.

Keywords: Regional Economic Growth; Human Development Index; Tax Ratio; Degree of Regional Fiscal Autonomy

Peran Tata Kelola Pemerintahan, GDP, dan Inflasi dalam Menarik Investasi Asing: Bukti Empiris di ASEAN

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris pengaruh pertumbuhan ekonomi pada indeks pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten dan Kota Provinsi Bali tahun 2014–2019 dengan memasukkan tax ratio dan derajat otonomi fiskal daerah sebagai variabel moderasi. Penelitian dilakukan pada seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Bali. Data pada penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik yang diuji menggunakan analisis regresi moderasi. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap IPM. Namun, pengaruh pertumbuhan ekonomi pada IPM tidak mampu ditingkatkan oleh tax ratio. Penelitian ini juga menemukan bahwa pengaruh pertumbuhan ekonomi pada IPM diperkuat oleh derajat otonomi fiskal daerah. Otonomi daerah mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang dapat dicapai dengan derajat otonomi fiskal daerah melalui pelaksanaan otonomi daerah. Sebaliknya, tax ratio belum tentu dapat meningkatkan tingkat IPM dikarenakan belum meratanya pembangunan yang berhubungan dengan peningkatan IPM Provinsi Bali.

Kata Kunci: Pertumbuhan Ekonomi Daerah; Indeks Pembangunan Manusia; Tax Ratio; Derajat Otonomi Fiskal Daerah

Artikel dapat diakses : <https://ejournal1.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/index>



e-ISSN 2302-8556

Vol. 35 No. 11
Denpasar, November 2025
Hal. 2187-2201

DOI:
10.24843/EJA.2025.v35.i11.
p16

PENGUTIPAN:

Partha, I. G. E. W., &
Dwirandra, A. A. N. B.,
(2025). Tax Ratio and
Degree of Regional Fiscal
Autonomy Moderate
Effect of Economic
Growth on Human
Development Index. E-
Jurnal Akuntansi, 35(12),
2187-2201

RIWAYAT ARTIKEL:

Artikel Masuk:
16 Mei 2025
Artikel Diterima:
01 November 2025

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan ukuran utama keberhasilan pembangunan, dan hasil pertumbuhan ekonomi dapat pula dinikmati oleh masyarakat sampai yang paling bawah, baik dengan sendirinya maupun dengan campur tangan pemerintah (Hamzah, 2008). Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan gambaran hasil kinerja pemerintah dalam mensejahterakan rakyatnya. Pertumbuhan ekonomi selalu menjadi indikator tingkat kesejahteraan penduduk suatu daerah atau Negara. Dengan tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan pendapatan, berarti secara langsung maupun tidak langsung akan mengurangi serta menurunkan tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Hamzah, 2008).

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta menurunnya tingkat IPM tentunya tidak terlepas dari pengelolaan keuangan daerah yang baik. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 4 Ayat (1) Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola oleh pemerintah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisiensi, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat. Otonomi fiskal daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Derajat otonomi fiskal daerah dapat diketahui dengan menghitung rasio pendapatan asli daerah pada total penerimaan daerah, rasio subsidi dan bantuan pemerintah pusat atau pemerintah yang lebih tinggi pada total penerimaan daerah, rasio pajak pusat untuk daerah pada total penerimaan daerah dan rasio penerimaan daerah pada total penerimaan negara (Smith, 1983).

IPM di suatu wilayah yang menggambarkan kombinasi antara tingkat kesehatan, tingkat pendidikan dan standar hidup layak (dengan ukuran ketimpangan antar wilayah). Data empiris IPM Kabupaten/Kota Provinsi Bali dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Bali 2014-2019

Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kab. Jembrana	68,67	69,66	70,38	70,72	71,65	72,35
Kab. Tabanan	72,68	73,54	74,19	74,86	75,45	76,16
Kab. Badung	77,98	78,86	79,80	80,54	80,87	81,59
Kab. Gianyar	74,29	75,03	75,70	76,09	76,61	77,14
Kab. Klungkung	68,30	68,98	69,31	70,13	70,90	71,71
Kab. Bangli	65,75	66,24	67,03	68,24	68,96	69,35
Kab. Karangasem	64,01	64,68	65,23	65,57	66,49	67,34
Kab. Buleleng	69,19	70,03	70,65	71,11	71,70	72,30
Kota Denpasar	81,65	82,24	82,58	83,01	83,30	83,68
Provinsi Bali	72,48	73,27	73,65	74,30	74,77	75,38
Nasional	68,90	69,55	70,18	70,81	71,39	71,92

Sumber: BPS Provinsi Bali (data diolah), 2021

Tabel 1. menunjukkan bahwa nilai IPM Provinsi Bali cenderung mengalami peningkatan dari 72,48 pada tahun 2014 menjadi 75,38 pada tahun 2019, walaupun tren IPM Bali meningkat dari tahun ke tahun tetapi masih ada beberapa daerah yang memiliki nilai IPM yang berada di bawah rata-rata IPM Provinsi. Selain itu jika di bandingkan dengan IPM nasional IPM Provinsi Bali

berada di atas IPM nasional yaitu pada tahun 2014 IPM Provinsi Bali sebesar 72,48 sedangkan IPM nasional sebesar 68,90 dan juga pada tahun 2019 IPM Provinsi Bali sebesar 75,38 sedangkan IPM nasional sebesar 71,92. Hal ini juga mengindikasikan bahwa IPM Provinsi Bali mampu mencapai peningkatan IPM yang maksimal karena dari tahun 2014 hingga 2019 terus berada di atas IPM Nasional, hal ini mengindikasikan bahwa penelitian terkait IPM khususnya di Provinsi Bali, sangat penting untuk di kaji kembali. Untuk itu peneliti meyakini bahwa dengan meningkatkan jumlah PAD yang diterima dan pemberian dana perimbangan yang lebih besar kepada daerah dari pemerintah pusat akan dapat mendorong peningkatan yang berkelanjutan bagi IPM di daerah, apalagi jika penerimaan daerah tersebut dialokasikan kepada belanja langsung yang bersentuhan langsung dengan komponen IPM. Belum tercapainya target pemerintah ini berimplikasi bahwa berbagai program pemerataan IPM yang sudah berjalan sampai saat ini belum sepenuhnya berhasil mengangkat kesejahteraan masyarakat miskin untuk bisa mencapai nilai IPM yang baik. Provinsi Bali yang dikenal sebagai destinasi pariwisata seharusnya mampu menanggulangi IPM yang dapat dilihat dari kemampuan masing-masing daerah.

Penelitian terdahulu mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi pada IPM dilakukan oleh Gopalakrishna et al. (2012) dimana hasilnya menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan pada IPM. Penelitian serupa oleh Rodionov et al. (2018) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif pertumbuhan ekonomi pada IPM. Sedangkan penelitian Annisa (2011); Katili (2011); Prastyo (2010) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif pada kemiskinan yang dilihat dari indeks IPM. Inkonsistensi hasil penelitian menjadi salah satu indikasi bahwa terdapat variabel moderasi yang dapat memperlemah atau memperkuat hubungan antara pertumbuhan ekonomi daerah terhadap tingkat IPM.

Terdapat berbagai macam faktor yang dapat berpengaruh pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Penelitian Putri et al. (2018) menyatakan bahwa rasio pajak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Terdapatnya pengaruh yang signifikan antara rasio pajak terhadap pertumbuhan ekonomi mengindikasikan bahwasannya pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh rasio pajak di Indonesia. Hal ini dikarenakan apabila penurunan di dalam tarif pajak akan mendorong masyarakat untuk lebih giat dalam bekerja, menabung dan menginvestasikan uangnya yang pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas perekonomian yaitu kemampuan untuk menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa. Meningkatnya produksi atau output agregat ini berarti meningkatnya kemampuan perekonomian untuk menciptakan kesempatan kerja. Sebaliknya apabila pajak meningkat maka akan mengurangi daya beli masyarakat sehingga, permintaan terhadap produksi barang dan jasa juga menjadi turun. Penurunan ini akan menurunkan kegiatan perekonomian.

Rasio pajak (*tax ratio*) selain mempengaruhi pertumbuhan ekonomi juga dapat mempengaruhi indeks pembangunan manusia (IPM). Pendapatan pajak berkontribusi cukup besar dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dimaksudkan untuk kembali digunakan dalam pembiayaan pembangunan fasilitas layanan publik dan sebagainya. Mengingat pendapatan pajak merupakan salah satu komponen dari arus masuk yang dimiliki

pemerintah. Baik atau buruknya pengelolaan pajak yang diterima menjadi satu faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah dalam penyediaan layanan publik bagi masyarakat. Jika pengelolaan pajak dapat dilakukan dengan efektif, maka tidak akan menghambat proses pembiayaan pembangunan fasilitas layanan publik bagi masyarakat (Anggraini & Sutaryo, 2015). Berdasarkan penjelasan tersebut, maka diketahui bahwa rasio pajak (*tax ratio*) dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan IPM, sehingga penting dikaji terkait peran rasio pajak dalam memoderasi pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan yang ditinjau dari rasio IPM.

Faktor lain yang dapat memperkuat ataupun memperlemah pengaruh pertumbuhan ekonomi dan IPM adalah derajat otonomi fiskal daerah. Menurut penelitian Putri et al. (2018) secara parsial derajat otonomi fiskal daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Terdapatnya pengaruh yang signifikan antara derajat otonomi fiskal daerah dan pertumbuhan ekonomi mengindikasikan bahwasannya pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh derajat otonomi fiskal daerah. Kondisi ini dikarenakan semakin besar kekuatan derajat otonomi fiskal suatu daerah maka akan semakin tinggi pertumbuhan ekonomi daerah tersebut sebab derajat otonomi fiskal memberikan ruang untuk daerah bisa menggunakan anggaran dengan lebih produktif.

Salah satu pilar yang harus ditegakkan dalam mengembangkan otonomi daerah yang lebih nyata adalah aspek pembiayaan. Tanpa keseimbangan pemberian otonomi antara tanggung jawab dengan pendanaannya maka esensi otonomi menjadi kabur (Basri, 2011). Sementara menurut Amal (2003) keterkaitan antara desentralisasi dan penerimaan asli daerah (PAD) yang paling realistis adalah bahwa desentralisasi memungkinkan pemberdayaan sosial, memberikan keleluasan kepada daerah untuk beradaptasi dengan perkembangan sosial ekonomi yang cepat di tingkat lokal sehingga memungkinkan untuk menggali potensi PAD secara maksimal.

Pelaksanaan derajat otonomi fiskal daerah di Indonesia sudah dilakukan sejak tanggal 1 Januari 2001. Melalui otonomi daerah dan derajat otonomi fiskal daerah, pemerintahan daerah memiliki wewenang untuk menggali pendapatan dan melakukan peran alokasi secara mandiri dalam menetapkan prioritas pembangunan. Diharapkan dengan adanya otonomi dan derajat otonomi fiskal daerah dapat lebih pemeratakan pembangunan sesuai dengan keinginan daerah untuk mengembangkan wilayah menurut potensi masing-masing.

Derajat otonomi fiskal daerah akan memberikan manfaat yang optimal jika diikuti oleh kemampuan finansial yang memadai oleh daerah otonom. Menurut UU No. 33 Tahun 2004 sumber penerimaan yang digunakan untuk pendanaan pemerintah daerah dalam pelaksanaan derajat otonomi fiskal daerah adalah: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dana bagi hasil, pinjaman daerah, dan lain-lain yang merupakan penerimaan sah.

Menurut Oates (1993) derajat otonomi fiskal daerah akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, karena pemerintah sub nasional/pemerintah daerah akan lebih efisien dalam produksi dan penyediaan barang-barang publik. Pengambilan keputusan pada level pemerintah lokal akan lebih didengarkan untuk menganekaragamkan pilihan

lokal dan lebih berguna bagi efisiensi alokasi. Derajat otonomi fiskal daerah di negara-negara berkembang apabila tidak berpegang pada standar teori desentralisasi, hasilnya mungkin akan merugikan pertumbuhan ekonomi dan efisiensi. Derajat otonomi fiskal daerah memungkinkan untuk melakukan korupsi pada level lokal karena memberikan pertimbangan politikus lokal dan birokrat yang dapat di akses dan peka pada kelompok bunga lokal.

Rasio pajak juga dapat mempengaruhi kuat lemahnya hubungan antara pertumbuhan ekonomi daerah pada IPM. Rasio pajak adalah perbandingan atau persentase penerimaan pajak pada produk domestik regional bruto (PDRB). Rasio ini menyatakan jumlah pajak yang dikumpulkan pada suatu masa berbanding dengan pendapatan regional bruto di masa yang sama. Rasio pajak merupakan salah satu indikator untuk menilai kinerja penerimaan pajak. Ketimpangan sumber pembiayaan masing-masing daerah dapat menjadi ukuran keragaman kemampuan antar daerah dalam menggali potensi penerimaan murni daerah terutama Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan penjelasan tersebut maka variabel derajat otonomi fiskal daerah, dan rasio pajak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dengan kata lain, apabila derajat otonomi fiskal daerah mengalami peningkatan sedangkan rasio pajak turun maka akan berdampak terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang akan berdampak pada indeks pembangunan manusia, sehingga penting untuk dilakukan penelitian terkait pengaruh pertumbuhan ekonomi daerah pada Indeks Pembangunan Manusia yang di moderasi oleh variabel *tax ratio* dan derajat otonomi fiskal daerah.

Teori Schumpeter menekankan tentang pentingnya pengusaha dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, bahwa para pengusaha merupakan golongan yang akan terus menerus membuat pembaharuan atau inovasi dalam kegiatan ekonomi. Inovasi tersebut meliputi memperkenalkan barang baru, mempertinggi efisiensi cara memproduksi dalam menghasilkan suatu barang, memperluas pasar sesuatu barang ke pasaran yang baru, mengembangkan sumber bahan mentah yang baru dan mengadakan perubahan-perubahan dalam organisasi dengan tujuan mempertinggi keefisienan kegiatan perusahaan. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi berarti terdapat peningkatan produksi sehingga menambah lapangan pekerjaan yang ada pada akhirnya akan meningkatkan IPM. Peningkatan IPM ini akan memberikan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan, sumber daya untuk pendidikan, dan kualitas kesehatan.

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang sangat penting dalam melihat kemajuan pembangunan ekonomi di suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu (Hellen et al., 2018). The World Bank (2007) mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah satu-satunya penggerak terpenting bagi upaya penanggulangan kemiskinan. Karena itu, upaya menjadikan pertumbuhan ekonomi bermanfaat bagi penduduk miskin membutuhkan upaya menciptakan pertumbuhan sekaligus memastikan bahwa pertumbuhan ini dapat dirasakan oleh penduduk miskin.

Dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka PDRB per kapita masyarakat meningkat. Seiring peningkatan PDRB, daya beli masyarakat meningkat, demikian pula dengan kemampuan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan masyarakat meningkatkan strata pendidikan mereka, pun demikian tingkat kesehatan masyarakat. Secara singkat dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi ini akan meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) karena IPM merupakan *composite index* yang dibentuk dari kemampuan daya beli masyarakat, tingkat pendidikan dan tingkat kesehatan mereka.

H₁: Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif pada IPM

Derajat otonomi fiskal daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang meningkat seiring dengan adanya kebijakan desentralisasi fiskal, sesuai dengan Teori Desentralisasi Fiskal. Meningkatnya derajat otonomi fiskal daerah berimplikasi pada meningkatnya sumber daya yang dimiliki pemerintah kabupaten/kota. Apabila peningkatan otonomi fiskal daerah ini diorientasikan pada program pemerintah terkait upaya meningkatkan IPM, seperti: daya beli masyarakat, tingkat pendidikan dan kesehatan publik maka berpeluang akan mendorong peningkatan IPM.

Tinggi rendahnya pengaruh pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota diakselerasi oleh tinggi rendahnya derajat otonomi fiskal daerah. Jika meningkatnya otonomi fiskal daerah digunakan untuk program-program terkait peningkatan IPM, seperti: program peningkatan daya beli, program kesehatan, dan pendidikan maka peningkatan derajat otonomi fiskal daerah ini akan meningkatkan pengaruh pertumbuhan ekonomi pada IPM. Hal sebaliknya bisa terjadi jika peningkatan pertumbuhan ekonomi ini tidak diorientasikan untuk mendukung program-program terkait IPM sehingga kemungkinan peningkatan derajat otonomi fiskal daerah tidak mampu mengakselerasi pengaruh pertumbuhan ekonomi pada IPM. Tingkat pendapatan dan IPM mempunyai korelasi yang luas. Namun pertumbuhan pendapatan tidak secara otomatis meningkatkan IPM. Masyarakat dapat memperoleh manfaat ganda dari pertumbuhan ekonomi serta peningkatan IPM jika pemerintah menggunakan manfaat dari pertumbuhan untuk membiayai pelayanan kesehatan dan akses pendidikan masyarakat miskin tersebut. Selain itu, struktur dan proses yang ada dimasyarakat sudah tepat, sehingga manfaat pertumbuhan ekonomi juga dinikmati masyarakat di setiap golongan. Amagoh & Amin (2012) menyimpulkan bahwa kemajuan pada kedua bidang saling memperkuat satu sama lain.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tinggi rendahnya pengaruh pertumbuhan ekonomi pada IPM dimoderasi oleh derajat otonomi fiskal daerah. *Tax ratio* yang tinggi dapat memperkuat pengaruh pertumbuhan ekonomi pada IPM. *Tax ratio* yang tinggi menjadi sumber pendanaan untuk pemerataan pertumbuhan dan pada akhirnya mengimplikasikan kepada peningkatan IPM. Pemerataan peningkatan pertumbuhan yang konsisten dan didanai oleh *tax ratio* yang tinggi dapat meningkatkan IPM.

H₂: *Tax Ratio* memperkuat pengaruh pertumbuhan ekonomi daerah pada IPM.

Otonomi fiskal daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang meningkat seiring dengan adanya kebijakan desentralisasi fiskal, sesuai dengan Teori Desentralisasi Fiskal

(Smith, 1983). Meningkatnya PAD berimplikasi pada meningkatnya sumber daya yang dimiliki pemerintah kabupaten/kota. Apabila peningkatan PAD ini diorientasikan pada program pemerintah terkait upaya meningkatkan IPM, seperti: daya beli masyarakat, tingkat pendidikan dan kesehatan publik maka berpeluang akan mendorong peningkatan IPM.

Tinggi rendahnya pengaruh pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota diakselerasi oleh tinggi rendahnya tax ratio (Anggraini dan Sutaryo, 2015). Jika meningkatnya tax ratio digunakan untuk proram-program terkait peningkatan IPM, seperti: program peningkatan daya beli, program Kesehatan, dan Pendidikan maka peningkatan tax ratio ini akan meningkatkan pengaruh pertumbuhan ekonomi pada IPM. Hal sebaliknya bisa terjadi jika peningkatan pertumbuhan ekonomi ini tidak dioerinetasikan untuk mendukung program-program terkait IPM sehingga kemungkinan peningkatan tax ratio tidak mampu mengakseerasi pengaruh pertumbuhan ekonomi pada IPM.

Dapat dikatakan bahwa Tinggi rendahnya pengaruh pertumbuhan ekonomi pada IPM dimoderasi oleh tax ratio (Anggraini & Sutaryo, 2015). Tax ratio yang tinggi dapat memperkuat pengaruh pertumbuhan ekonomi pada kemiskinan. Tax ratio yang tinggi menjadi sumber pendanaan untuk pemerataan pertumbuhan dan pada akhirnya mengimplikasikan kepada peningkatan IPM. Pemerataan peningkatan pertumbuhan yang konsisten dan didanai oleh tax ratio yang tinggi dapat meningkatkan tingkat IPM. Tinggi rendahnya hubungan pertumbuhan ekonomi pada IPM dapat diperkuat dengan adanya derajat ekonomi fiskal, yaitu kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), yang meningkat seiring dengan adanya kebijakan desentralisasi fiskal, sesuai dengan Teori Desentralisasi Fiskal. Derajat otonomi fiskal daerah menjelaskan mengenai kemampuan suatu daerah dalam membiayai urusan rumahtangganya dengan menghitung rasio pendapatan asli daerah pada total penerimaan daerah tanpa transfer. Derajat otonomi fiskal daerah merefleksikan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari masing-masing Kabupaten dan Kota seberapa besar PAD mampu membiayai keseluruhan belanja rutin daerahnya. Semakin tinggi derajat otonomi fiskal daerah maka dapat memperkuat pengaruh pertumbuhan ekonomi pada IPM.

H₃ Derajat otonomi fiskal daerah memperkuat pengaruh pertumbuhan ekonomi daerah pada IPM.

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah 8 Kabupaten dan 1 Kota di Provinsi Bali. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2019, p. 216). Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh delapan (8) kabupaten dan satu (1) kota di Provinsi Bali, atau dengan kata lain penetapan sampel menggunakan metode sampel jenuh (Sugiyono, 2019, p. 122).

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dinas atau instansi yang terkait, yaitu BPS dan Bagian Keuangan Provinsi Bali serta situs-situs Departemen Dalam Negeri dan Departemen Keuangan, beberapa laporan realisasi anggaran, data mengenai PDRB, dan IPM tahun anggaran 2014-2019.

Data tingkat kemiskinan diprosikan dengan data presentase Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2014-

2019 dalam persen. Rasionalisasinya adalah ketika masyarakat tingkat kemiskinannya rendah maka mereka berpeluang mencapai IPM yang tinggi.

Pertumbuhan Ekonomi Daerah, merupakan kenaikan output riil yang diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Perekonomian Indonesia diukur dengan alat Produk Domestik Bruto berdasarkan harga konstan (Setiawina, 2004). Penelitian ini menggunakan PDRB atau dasar harga konstan karena mencerminkan pertumbuhan riil dari sektor-sektor ekonomi dari tahun ke tahun (Bappeda dan BPS Provinsi Bali, 2008, p. 65).

Rasio pajak (*tax ratio*) adalah perbandingan pendapatan regional (Produk Domestik Regional Bruto), dan upaya perpajakan (*tax effort*) adalah jumlah pajak secara nyata yang dapat dipungut oleh kantor pajak. Sedangkan kapasitas pajak (*tax capacity*) adalah jumlah pajak yang seharusnya dapat dikumpulkan dari dasar pajak yang umumnya berupa pendapatan perkapita.

Derajat otonomi fiskal daerah yaitu perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total penerimaan APBD. Variabel Derajat Otonomi Fiskal daerah (ADR), diukur dengan menggunakan perbandingan antara PAD dan total APBD (dalam bentuk persen).

Teknik analisis data yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi moderasi (*moderated regression analyses*) dengan bantuan *Software Statistical Package for Social Science (SPSS) for Windows Versi 2.4*. Tahap analisis yang dilakukan adalah uji asumsi klasik, analisis statistik deskriptif, uji hipotesis (Uji t), uji kelayakan model (Uji F), dan analisis koefisien determinasi (R^2). Model regresi linier berganda ditunjukkan dengan persamaan struktural, sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 M_1 + \beta_3 M_2 + \beta_4 X_1.M_1 + \beta_5 X_1.M_1 + e \dots\dots\dots(1)$$

Keterangan:

- Y = Indeks Pembangunan Manusia
- α = Konstanta
- $\beta_1 - \beta_3$ = Koefisien Regresi
- X_1 = Pertumbuhan Ekonomi Daerah
- M_1 = *Tax Ratio*
- M_2 = Derajat Otonomi Fiskal Daerah
- e = *Error term*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi variabel penelitian menyampaikan informasi mengenai karakteristik variabel-variabel penelitian yang terdiri dari jumlah pengamatan, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata dan standar deviasi. Tabel 2. memperlihatkan hasil analisis statistik deskriptif.

Tabel 2. Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
IPM	45	64,68	83,68	73,38	5,48
PDRB	45	22.218,27	93.691,52	47.040,39	15.209,19
Tax Ratio	45	5,06	7,71	5,97	0,59
Derajat Otonomi Fiskal	45	11,24	517,78	121,62	138,92
Valid N (listwise)	45				

Sumber: Data Penelitian, 2021

Satuan data masing-masing variabel dalam Tabel 2. statistik deskriptif adalah sebagai berikut: 1) IPM memiliki satuan persen, 2) PDRB memiliki satuan ribuan rupiah, 3) *Tax Ratio* memiliki satuan persen, 4) Derajat Otonomi Fiskal memiliki satuan persen. Uraian mengenai statistic deskriptif masing-masing variabel dijelaskan sebagai berikut.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki nilai rata-rata sebesar 73,38 persen, dengan nilai standar deviasi sebesar 5,48 persen. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) paling rendah (minimum) adalah sebesar 64,68 persen yaitu terjadi pada Kabupaten Karangasem tahun 2015 dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang paling tinggi (maksimum) adalah sebesar 83,68 persen yang terjadi pada Kota Denpasar di tahun 2019.

Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang diukur menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki nilai rata-rata sebesar 47.040,39 ribu rupiah, dengan nilai standar deviasi sebesar 15.209,19 ribu rupiah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) paling rendah (minimum) adalah sebesar 22.218,27 ribu rupiah yaitu terjadi pada Kabupaten Bangli pada tahun 2015 dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang paling tinggi (maksimum) adalah sebesar 93.691,52 ribu rupiah yang terjadi pada Kabupaten Badung pada tahun 2019. Nilai standar deviasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) lebih rendah dibandingkan nilai rata-ratanya, yang berarti bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada Provinsi Bali sudah merata.

Rasio pajak (*tax ratio*) memiliki nilai rata-rata sebesar 5,96 persen, dengan nilai standar deviasi sebesar 0,59 persen. Rasio pajak (*tax ratio*) paling rendah (minimum) adalah sebesar 5,06 persen yang terjadi pada Kabupaten Karangasem tahun 2017 dan rasio pajak (*tax ratio*) yang paling tinggi (maksimum) adalah sebesar 7,71 persen yang terjadi pada Kabupaten Badung di tahun 2016. Nilai standar deviasi rasio pajak (*tax ratio*) lebih rendah dibandingkan nilai rata-ratanya, yang berarti bahwa rasio pajak (*tax ratio*) pada Provinsi Bali sudah merata.

Derajat otonomi fiskal memiliki nilai rata-rata sebesar 121,62 persen, dengan nilai standar deviasi sebesar 138,92 persen. Derajat otonomi fiskal paling rendah (minimum) adalah sebesar 11,24 persen yang terjadi pada Kabupaten Gianyar tahun 2015 dan derajat otonomi fiskal yang paling tinggi (maksimum) adalah sebesar 517,78 persen yang terjadi pada Kabupaten Badung di tahun 2018. Nilai standar deviasi derajat otonomi fiskal lebih rendah dibandingkan nilai rata-ratanya, yang berarti bahwa derajat otonomi fiskal pada Provinsi Bali sudah merata.

Sebelum diproses lebih lanjut, data akan diuji terlebih dahulu pemenuhan uji asumsi klasik yang meliputi: uji normalitas data, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Uji ini dilakukan, menurut (Ghozali, 2016), agar supaya Model predeksian indeks pembangunan manusia/IPM yang terbentuk adalah model prediksi yang baik atau yang bersifat *BLUE (Best Linear Unbiased Estimator)*.

Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa nilai *Kolmogorov Sminarnov (K-S)* sebesar 0,478, sedangkan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,976. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa model persamaan regresi tersebut berdistribusi normal karena nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* 0,976 lebih dari nilai *alpha* 0,05.

Uji autokorelasi dilakukan dengan Uji Durbin-Watson (DW-test) atau d statistik terhadap variabel pengganggu (*disturbance error term*). Nilai DW 2,488, nilai ini bila dibandingkan dengan nilai tabel signifikansi 5%, jumlah sampel 45 (n) dan jumlah variabel independen (K=5) maka diperoleh nilai du 1,7762. Nilai DW 2,488 lebih dari batas atas (du) yakni 1,7762 dan kurang dari (4-du) 4-1,808 = 2,2238, maka dapat disimpulkan bahwa data sudah lolos uji autokorelasi dengan menggunakan Durbin Watson test.

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai *tolerance* dan VIF dari variabel pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk, tingkat pendidikan dan pengangguran. Nilai tersebut menunjukkan bahwa nilai *tolerance* untuk setiap variabel lebih besar dari 10% atau 0,1 dan nilai VIF lebih kecil dari 10 yang berarti model persamaan regresi bebas dari multikolinearitas.

Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari variabel pertumbuhan ekonomi sebesar 0,223, rasio pajak (*tax ratio*) sebesar 0,239; derajat otonomi fiskal daerah sebesar 0,062, variabel interaksi X.M1 sebesar 0,293 dan variabel interaksi X.M2 sebesar 0,071. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05 yang berarti tidak terdapat pengaruh antara variabel bebas terhadap *absolute residual*. Dengan demikian, model yang dibuat tidak mengandung gejala heteroskedastisitas

Pengujian data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Perhitungan koefisien regresi linier berganda dilakukan dengan analisis regresi melalui *software SPSS 24.0 for Windows*, diperoleh hasil yang ditunjukkan pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.	Hasil Uji Hipotesis
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	14,669	0,494			0,494	
X1	0,001	0,031	2,672		0,031	H ₁ diterima
M1	6,706	0,077	0,725		0,077	
M2	0,078	0,000	1,968		0,000	
X1.M1	0,000	0,195	2,218		0,195	H ₂ ditolak
X1.M2	0,001	0,002	2,140		0,002	H ₃ diterima
R Square	0,753					
Adjusted R Square	0,721					
F.sig	0,000					

Sumber: Data Penelitian, 2021

Tabel 3. menunjukkan nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,753 mempunyai arti bahwa sebesar 75,3% variasi IPM dapat dijelaskan oleh variasi pertumbuhan ekonomi daerah, *tax ratio*, Derajat Otonomi Fiskal Daerah, variabel interaksi X.M1 dan variabel interaksi X.M2, sedangkan sisanya sebesar 24,7% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model.

Hasil analisis menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi secara parsial berpengaruh positif terhadap IPM. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi, maka akan menambah IPM di wilayah Provinsi Bali. Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan tingkat pendapatan mempunyai korelasi yang luas dengan IPM. Namun, pertumbuhan pendapatan

tidak secara otomatis meningkatkan IPM. Demikian pula, perbaikan kesehatan dan pendidikan yang menyebabkan peningkatan IPM tidak selalu mengarah pada peningkatan pendapatan. Hal ini disebabkan sumber daya yang dihasilkan oleh pertumbuhan ekonomi tidak dapat digunakan untuk mempromosikan perbaikan indikator lainnya. Selain itu, struktur dan proses yang terjadi di masyarakat tidak dapat memberikan manfaat bagi kaum miskin. Misalnya, berbagai peningkatan hasil panen hanya menguntungkan bagi pemilik tanah dan bukan tenaga kerja sehingga pendapatannya akan kurang untuk memenuhi kehidupan sehari-hari (Zakaria, 2018).

Hasil ini sejalan dengan penelitian Safitri (2020) yang menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat IPM. Penelitian serupa oleh Andhykha et al. (2018) menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan PDRB berpengaruh positif dan signifikan. Artinya ketika PDRB semakin besar maka IPM akan semakin besar. Sejalan dengan hasil penelitian, teori IPM relatif yang dikemukakan oleh Arsyad (2010) menyatakan bahwa IPM akan berubah apabila kondisi perekonomian masyarakat meningkat yang disebabkan oleh inflasi, sehingga kesenjangan indeks IPM akan selalu ada.

Pemerintah Daerah dipandang perlu memerhatikan pertumbuhan ekonomi sebagai sebuah instrumen dalam mendorong pembangunan ekonomi agar pada akhirnya dapat mencapai peningkatan IPM yang efektif dan meningkatkan kesejahteraan (*welfare*) masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dapat menjadi variabel yang sangat penting bagi upaya meningkatkan IPM di daerah, khususnya Provinsi Sumatera Selatan. Dengan adanya pertumbuhan pendapatan riil masyarakat maka akan terjadi peningkatan daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat adalah aspek penting agar masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, utamanya memenuhi kebutuhan minimal standar hidup layak (*basic needs*). Apabila daya beli masyarakat meningkat akibat adanya kenaikan pendapatan riil masyarakat maka tentu pengeluaran masyarakat dapat lebih meningkat dan lebih sejahtera. Sebaliknya, jika daya beli masyarakat lemah akibat rendahnya pendapatan riil masyarakat maka akan menyebabkan masyarakat sulit memenuhi standar minimal hidup layak.

Hasil analisis menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi pada IPM tidak diperkuat oleh *tax ratio*. Hal ini berarti bahwa nilai *tax ratio* tidak dapat memperkuat hubungan pertumbuhan ekonomi pada IPM. Tinggi rendahnya *Tax ratio* tidak dapat memberikan konsekuensi kepada pemerataan pertumbuhan. Pemerataan peningkatan pertumbuhan yang konsisten dan didanai oleh *tax ratio* yang tinggi tidak dapat meningkatkan IPM.

Dewi & Supadmi (2016) menyatakan bahwa hubungan pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia dapat dilihat melalui kebijakan dan pengeluaran pemerintah. Dalam hal ini, faktor yang menentukan adalah pengeluaran pemerintah untuk subsektor yang terangkum dalam belanja modal. Besarnya pengeluaran pemerintah mengidentifikasikan besarnya peran pemerintah terhadap pembangunan manusia. Dapat dikatakan pengeluaran pemerintah merupakan hal utama yang memicu adanya suatu hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Dewi & Supadmi (2016) yang menyatakan bahwa tinggi rendahnya pengaruh pertumbuhan ekonomi pada IPM tidak dapat dimoderasi oleh *tax ratio*. Pendapatan pajak berkontribusi cukup besar dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dimaksudkan untuk kembali digunakan dalam pembiayaan pembangunan fasilitas layanan publik dan sebagainya. Mengingat pendapatan pajak merupakan salah satu komponen dari arus masuk yang dimiliki pemerintah, baik atau buruknya pengelolaan pajak yang diterima menjadi satu faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah dalam penyediaan layanan publik bagi masyarakat. Jika pengelolaan pajak dapat dilakukan dengan efektif, maka tidak akan menghambat proses pembiayaan pembangunan fasilitas layanan publik bagi masyarakat.

Hasil ini juga sesuai dengan penelitian Sumedi & Supardi (2004) serta Anggraini & Sutaryo (2015) yang menyatakan bahwa rasio efektivitas pajak daerah yang tidak memiliki pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Efektivitas pajak yang semakin tinggi akan memungkinkan pemerintah daerah memiliki kecukupan dana yang baik dalam menyediakan layanan publik. Dalam publikasi BPS mengenai IPM, penyediaan layanan publik yang baik diharapkan akan meningkatkan IPM sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan kinerja pemerintah daerah.

Hasil analisis menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi pada IPM diperkuat oleh derajat otonomi fiskal daerah. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi derajat otonomi fiskal daerah maka dapat memperkuat pengaruh pertumbuhan ekonomi pada IPM. Tinggi rendahnya hubungan pertumbuhan ekonomi pada IPM dapat diperkuat dengan adanya derajat ekonomi fiskal. Derajat otonomi fiskal daerah menjelaskan mengenai kemampuan suatu daerah dalam membiayai urusan rumahtangganya dengan menghitung rasio pendapatan asli daerah pada total penerimaan daerah tanpa transfer. Derajat otonomi fiskal daerah merefleksikan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari masing-masing Kabupaten dan Kota seberapa besar PAD mampu membiayai keseluruhan belanja rutin daerahnya.

Dewi & Supadmi (2016) menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat bagi pengurangan tingkat kemiskinan. Terdapat hubungan yang negatif antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan. Kenaikan pertumbuhan ekonomi akan menurunkan tingkat kemiskinan. Hubungan ini menunjukkan pentingnya mempercepat pertumbuhan ekonomi untuk menurunkan tingkat kemiskinan.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Anggraini & Sutaryo (2015) yang menyatakan bahwa rasio derajat desentralisasi berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Melalui rasio derajat desentralisasi dapat diketahui seberapa besar kemampuan pemerintah daerah menyelenggarakan desentralisasi dengan cara meningkatkan PAD. Semakin tinggi PAD yang diperoleh maka semakin tinggi pula dana yang dapat digunakan pemerintah dalam membangun layanan publik bagi masyarakat. Jika layanan publik dapat terpenuhi dengan baik diharapkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga dapat meningkat.

SIMPULAN

Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap IPM. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi, maka meningkatkan IPM, sebaliknya jika tingkat pertumbuhan ekonomi semakin rendah maka akan menurunkan tingkat IPM yang terjadi di wilayah Provinsi Bali. Pengaruh Pertumbuhan ekonomi terhadap IPM tidak mampu dimoderasi oleh *tax ratio*. Hal ini berarti bahwa tinggi atau rendahnya *tax ratio* tidak mampu memoderasi hubungan pertumbuhan ekonomi pada IPM. Pengaruh Pertumbuhan ekonomi pada IPM diperkuat oleh derajat otonomi fiskal daerah. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi derajat otonomi fiskal daerah maka dapat memperkuat pengaruh pertumbuhan ekonomi pada IPM. Tinggi rendahnya hubungan pertumbuhan ekonomi pada IPM dapat diperkuat dengan adanya derajat ekonomi fiskal.

Penelitian ini hanya menggunakan populasi penelitian di Kabupaten/Kota Provinsi Bali dikarenakan keterbatasan data IPM pada wilayah seluruh Indonesia. Hal ini mengakibatkan kemungkinan hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan untuk semua tingkat pemerintah daerah kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan periode pandemi (2020-2021). Pengujian IPM pada periode ekonomi normal dibandingkan dengan periode pandemi menarik untuk diteliti untuk penelitian selanjutnya.

REFERENSI

- Amagoh, F., & Amin, A. A. (2012). An Examination of the Impacts of Fiscal Decentralization on Economic Growth. *International Journal of Business Administration*, 3(6), 72-81. <https://doi.org/10.5430/ijba.v3n6p72>
- Amal, I. (2003). *Hubungan Pusat Daerah dalam Pembangunan*. PT Raja Grafindo Persada.
- Andhykha, R., Handayani, H. R., & Woyanti, N. (2018). Analisis Pengaruh PDRB, Tingkat Pengangguran, dan IPM Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. *Media Ekonomi Dan Manajemen*, 33(2), 113-123. <https://doi.org/10.24856/mem.v33i2.671>
- Anggraini, T., & Sutaryo. (2015). Pengaruh Rasio Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pemerintah Provinsi Di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi (SNA)*.
- Annisa, G. R. (2011). *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran Dan Kemiskinan Dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Antecedent (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur)*. Fakultas Ekonomi Akuntansi UII Yogyakarta.
- Arsyad, L. (2010). *Ekonomi Pembangunan, Edisi Ketiga*. STIE YKPN.
- Bappeda dan BPS Provinsi Bali. (2008). *Produk Domestik Regional Bruto Daerah Tingkat I Bali*.
- Basri, S. (2011). Optimalisasi Penerimaan Daerah Di Dalam Peningkatan Kemampuan Keuangan Daerah Kota Pekanbaru. *Jurnal Ekonomi Universitas Riau*, 19(1).
- Dewi, I. G. A. A., & Supadmi, N. L. (2016). Pengaruh Alokasi Belanja Rutin Dan

- Belanja Modal Pada Indeks Pembangunan Manusia. *E-Jurnal Akuntansi Udayana*, 14(1), 695-722.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gopalakrishna, B. V, Rao, J., & Rao, G. B. V. (2012). Economic Growth & Human Development: The Experience of Indian States. *Indian Journal of Industrial Relations*, 47(4), 634-644.
- Hamzah, A. (2008). Analisis Kinerja Keuangan Pada Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Dan Kemiskinan: Pendekatan Analisis Jalur (Studi Pada 29 Kabupaten dan 9 Kota Di Provinsi Jawa Timur Periode 2001-2006). *Simposium Nasional Akuntansi XI*.
- Hellen, H., Mintarti, S., & Fitriadi, F. (2018). Pengaruh investasi dan tenaga kerja serta pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi serta kesempatan kerja. *Inovasi*, 13(1), 28. <https://doi.org/10.29264/jinv.v13i1.2490>
- Katili, C. Y. (2011). *Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Kemiskinan dan IPM (Studi Kasus Daerah Kabupaten Dan Kota di Provinsi Jawa Tengah)*. Fakultas Ekonomi Akuntansi UII Yogyakarta.
- Oates, W. E. (1993). Fiscal Decentralization And Economic Development. *National Tax Journal*, 26(2), 237-243. <https://doi.org/10.1086/ntj41789013>
- Prastyo, A. A. (2010). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus 35 Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun 2003-2007)*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
- Putri, R., Nazar, M. R., & Kurnia, K. (2018). Pengaruh Corporate Social Responbility, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak (perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bei 2014-2016). *EProceedings of Management*, 5(2), 21-39.
- Rodionov, D. G., Kudryavtseva, T. J., & Skhvediani, A. E. (2018). Human development and income inequality as factors of regional economic growth. *European Research Studies Journal*, XXI(Special Issue 2), 323-337.
- Safitri, S. I. (2020). *Analisis Pengembangan Bumdes Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada BUMDes Giat Makmur di Desa Tugu Papak Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus)*. UIN Raden Intan Lampung.
- Setiawina, N. D. (2004). Pengaruh Sektor Moneter Dan Fiskal Pada Perekonomian Indonesia (PDB Total) Selama Pembangunan Jangka Panjang Tahap Pertama 1969-1993. *Buletin Studi Ekonomi*, 9(2), 94-105.
- Smith, T. P. (1983). Support tuition tax credits. *Music Educators Journal*, 69(5), 15-15. <https://doi.org/10.2307/3396188>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sumedi, & Supardi. (2004). *Kemiskinan di Indonesia : Suatu Fenomena Ekonomi* (No. 21; Icaserd Working Paper).
- The World Bank. (2007). Era Baru dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *The World Bank*, 112(483), 211-212.
- Zakaria, R. (2018). Pengaruh Tingkat Jumlah Penduduk, Pengangguran, Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi Dan Belanja Modal Terhadap Indeks

Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2016. *Dspace*
UII, 1-19.